



***RENCANA KERJA
PERUBAHAN ANGGARAN
TAHUN 2025***



**DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat Rahmat, Taufik dan Hidayat-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja perubahan (Renja perubahan) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan dan rencana yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan perubahan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan sampai dengan semester ke II tahun anggaran 2025

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan dalam rangka melengkapi dan menyempurnakan dokumen Renja ini agar dapat menjadi perbaikan dan koreksi pada penyusunan renja berikutnya dan dapat menjadi pedoman dalam menyusun rangkaian pekerjaan selanjutnya.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak atas dukungan dan sumbangsuhnya sehingga Renja perubahan ini dapat tersusun sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, semoga bermanfaat dalam upaya meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Malili, Agustus 2025
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan



dr. BENNY, M.Kes
Pangkat: Pembina Utama Muda/IV c
NIP. 19680608 200112 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWUAN II TAHUN 2025	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	9
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur	16
2.4. Capaian Pelaksanaan Rancangan Awal Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025	17
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	29
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur	29
3.2. Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025	30
BAB IV PENUTUP	48

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun berjalan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan serta Kebutuhan Anggaran Indikatif kegiatan. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan merupakan salah satu rangkaian tahapan perencanaan pembangunan setelah tersusunnya RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD. Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan pengkajian Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya, pencapaian target Renstra Perangkat Daerah, usulan dari masyarakat/para pemangku kepentingan, serta analisis kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan dan rencana yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a) Perubahan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan;
- b) Perubahan proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, terdiri dari:
 1. Perubahan realisasi dan proyeksi/target pendapatan tahun 2025;
 2. Perubahan realisasi dan proyeksi/target belanja tahun 2025; dan
 3. Perubahan realisasi dan proyeksi/target pembiayaan tahun 2025

- c) Perubahan matrik rencana program dan kegiatan tahun 2025 untuk semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Renja perubahan Dinas Damkar dan penyelamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Damkar ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah dan selanjutnya menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) melalui penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-Undangan yang melandasi penyusunan Rencana Kerja pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 adalah:

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
19. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025 ini adalah :

1. Mengkaji RKPD Kabupaten Luwu Timur berdasarkan evaluasi kinerja semester I tahun 2025, evaluasi pencapaian target Renstra, usulan masyarakat/pemangku kepentingan serta kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
2. Merumuskan Daftar Program, Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran Indikatif yang akan dilaksanakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur semester II pada Tahun Anggaran 2025.

Tujuan penyusunan Rancangan Perubahan Renja Tahun 2025 ini adalah : Menetapkan Daftar Program dan Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur sebagai pedoman penyusunan RKA-Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Berisi uraian singkat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud & tujuan serta sistematika penulisan RENJA Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Berisi uraian singkat tentang evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025, capaian target Renstra s/d tahun 2024, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas & fungsi, review terhadap Rancangan Awal RKPD serta penelaahan usulan masyarakat / pemangku kepentingan.

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Berisi uraian singkat tentang penelaahan terhadap kebijakan Nasional dalam pembangunan sosial, pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan masyarakat, tujuan & sasaran pembangunan Dinas Pemadam Kebakaran

dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur serta daftar Program, Kegiatan & Kebutuhan Anggaran Indikatif Tahun Anggaran 2025.

BAB IV Penutup

Berisi kesimpulan dan kaidah-kaidah pelaksanaan Rancangan Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur.

BAB II

**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN
2025**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sampai dengan Triwulan II
Tahun 2025**

Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan melaksanakan 2 program kegiatan yaitu

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kab. /Kota
2. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

Perkiraan tingkat capaian target indicator program dalam renstra perangkat daerah sampai dengan triwulan II tahun 2025 secara singkat sebagai berikut

1. Tingkat capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah Kab./Kota sebesar 42 %
2. Tingkat capaian program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran masih sangat minim
3. Adapun tingkat capaian program prioritas Dinas Damkar dan penyelamatan Kabupaten Luwu Timur sampai dengan triwulan II tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 2.1 Capaian prioritas Dinas Damkar dan Penyelamatan Tahun 2025

No	Program	Indikator kinerja	Target dan capaian kinerja program	
			target	Capaian s/d TW II
1	Program pencegahan, penanggulangan,	1. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	97,59 %	75,86 %

penyelamatan korban kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	2. Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten (%)	54,25 %	25,43 %
	3. Persentase Desa/Kelurahan siap siaga kebakaran (%)	54,25 %	25,43 %
	4. Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	100 %	100 %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Damkar dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur memiliki tugas yang komplit dan luas, disamping menjalankan tupoksi juga banyak melaksanakan tugas tambahan yang diamanatkan oleh pimpinan yang wajib untuk diselesaikan.

Jumlah aparatur Dinas Damkar dan Penyelamatan sebanyak 16 orang PNS dan 147 orang anggota damkar yang masih berstatus tenaga kontrak, dimana mengalami pengurangan jumlah dari waktu ke waktu akibat banyaknya petugas damkar yang memilih resign yang kemudian mencoba peruntungan pekerjaan ditempat lain.

Struktur organisasi Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten luwu timur nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah yang telah ditindak lanjuti dengan peraturan Bupati Luwu Timur nomor 41 tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, terdiri dari :

1. Kepala Dinas

Tugas pokok :

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebakaran dan penyelamatan, perlindungan masyarakat serta tugas pembantuan yang diberikan

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran.
4. Pelaksanaan administrasi DPKP; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsi DPKP.

2. Sekretaris Dinas

Tugas Pokok :

Melaksanakan urusan kesekretariatan untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas.

Fungsi :

1. Perencanaan program kerja sekretariat.
2. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan.
3. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
4. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program kerja sekretariat; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi sekretariat.

3. Kepala sub bagian umum dan kepegawaian

Tugas Pokok :

Melaksanakan urusan umum dan kepegawaian

Fungsi :

1. Perencanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;

3. Pelaksanaan urusan ketatasahaan dan ketatalaksanaan internal kantor;
 4. Pelaksanaan urusan kepegawaian internal kantor;
 5. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
 6. Pelaksanaan urusan pelayanan informasi dan kehumasan;
 7. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 8. Pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
4. Kepala sub bagian perencanaan dan keuangan
- Tugas Pokok :
- Melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan
- Fungsi :
1. Perencanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan
 3. Pelaksanaan urusan perencanaan.
 4. Pelaksanaan urusan keuangan dan pelaporan
 5. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan.
5. Bidang Pencegahan
- Tugas Pokok :
- Memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang pencegahan dan inspeksi, peningkatan kapasitas aparatur dan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha sesuai dengan ketentuan perundang undangan
- Fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pencegahan dan inspeksi
 2. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang peningkatan kapasitas aparatur

3. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya
6. Seksi Pencegahan dan Inspeksi
Tugas Pokok :
Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pencegahan dan inspeksi sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
Fungsi :
 1. Perencanaan kegiatan seksi pencegahan dan inspeksi
 2. Pengorganisasian, Pendistribusian dan pembagian pelaksanaan tugas seksi pencegahan dan inspeksi
 3. Pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi pencegahan dan inspeksi
 4. Pengumpulan data, analisis dan penyusunan dokumen kajian resiko kebakaran dan penyelamatan
7. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur
Tugas pokok :
Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi peningkatan kapasitas aparatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
Fungsi :
 1. Perencanaan kegiatan seksi peningkatan kapasitas aparatur
 2. Pengorganisasian, pendistribusian dan pembagian pelaksanaan tugas seksi peningkatan kapasitas aparatur
 3. Pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi peningkatan kapasitas aparatur
 4. Perencanaan kebijakan, Analisa dan kajian kebutuhan serta penataan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan

5. melakukan program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan baik pengembangan dan peningkatan kapasitas teknik keterampilan maupun manajemen serta mental spiritual aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan

8. Seksi pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha

Tugas pokok :

Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Fungsi :

1. Menyusun rencana kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha sebagai pedoman dalam menjalankan tugas
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/menandatangani naskah dinas
5. Melakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui pembentukan relawan pemadam kebakaran dan kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran kepada masyarakat.

9. Bidang Pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana

Tugas pokok :

Memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang pemedaman kebakaran, penyelamatan dan evakuasi, dan sarana prasarana, informasi dan pengolah data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemadaman kebakaran
 2. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penyelamatan dan evakuasi
 3. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang sarana prasarana, informasi dan pengolahan data
 4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya
10. Seksi pemadam kebakaran
- Tugas pokok :
- Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pemadam kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- Fungsi :
1. perencanaan kegiatan seksi pemadam kebakaran
 2. pengorganisasian kegiatan dan pembagian tugas pemadaman kebakaran
 3. penyelenggaraan operasi pemadaman dan layanan respon cepat penanggulangan dan pengendalian kebakaran
 4. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pemadam kebakaran
11. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi
- Tugas pokok :
- Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi penyelamatan dan evakuasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
- Fungsi :
1. Perencanaan kegiatan seksi penyelamatan dan evakuasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas

2. pengorganisasian kegiatan dan pembagian tugas seksi penyelamatan evakuasi
 3. Penyelenggaraan operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran, korban kebakaran dan terdampak kebakaran pada kejadian kebakaran dalam wilayah kabupaten
 4. Penyelenggaraan layanan respon cepat (response time) penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia pada kejadian kebakaran dan non kebakaran.
12. Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data
- Tugas pokok :
- Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi sarana prasarana, informasi dan pengolah data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
- Fungsi :
1. Perencanaan kegiatan seksi sarana prasarana, informasi dan pengolah data sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
 2. pengorganisasian kegiatan seksi sarana prasarana, informasi dan pengolah data
 3. Penyelenggaraan analisis kebutuhan, identifikasi, standarisasi, inventarisasi, pemeliharaan dan perawatan sarpras pemadam kebakaran dan penyelamatan
 4. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan system informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi antara pusat, provinsi dan daerah serta melakukan pemeliharaan system informasi kebakaran dan penyelamatan
 5. Melaksanakan verifikasi/validasi data dan laporan, pengolahan data dan laporan, dan penyajian data dan laporan kebakaran dan penyelamatan
13. Jabatan Fungsional

Pengangkatan jabatan fungsional pada Dinas dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan informasi, serta sesuai dengan peraturan perundang undangan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur

Penentuan Isu – isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur adalah :

1. Sarana dan Prasarana serta jumlah aparatur belum memadai.
2. Kompetensi Sumber Daya Manusia untuk mendukung pelayanan publik masih kurang.
3. Belum terbangunnya Pos Pemadam kebakaran secara keseluruhan pada setiap posko Kecamatan
4. Partisipasi masyarakat dalam Membentuk satuan relawan pemadam kebaran (redkar)
5. Belum terkoordinasinya kemitraan dengan instansi teknis terkait dalam pelaksanaan penanggulangan Kebakaran.



2.4 Capaian Pelaksanaan Rancangan Awal Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

Tabel 2.2

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kinerja Kegiatan/ sub kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Akhir Periode Renstra OPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s.d Renja OPD 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II				Realisasi Capaian Kinerja dan anggaran Renja yang di evaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 s/d 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		11		12=5+11		13=12/4 X 100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1:05	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT																	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100%	26.826.830.372	100%	4.536.218.020	100%	5.314.668.724	999.207.362	42 %	2.446.973.301							
001.1	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu (%)	100%	524.410.000	100%	108.824.100	100%	102.335.000	13.470.000	-	12.707.805							
001.1.1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)	2 dokumen	115.000.000	2 dokumen	26.107.000	1	31.185.000	1	7.110.000	0	5.597.905						



001.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA	1 dokumen	20.705.000			1	5.375.000	-	-	-	-						
001.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	1 dokumen	11.500.000			1	5.375.000	-	--	-	-						
001.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	3 dokumen	115.000.000	3	15.611.360	4	16.500.000	1		2	1.294.860						
001.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	8 dokumen	230.000.000	8	42.895.792	4	43.900.000	1	6.360.000	1	4.006.000						



001.2	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	100%					4.267.192.621										
001.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)		11.774.763.800	22	2.019.439.310	44	4.203.828.921	44	799.524.837	44	2.145.208.325						
001.2.2	Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	persentase ketersediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		322.679.280	1	23.870.700	1	56.074.700	-	4.420.000	-	-						
001.2.3	pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	persentase penyelesaian dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		23.205.000	1	2.341.485	1	1.930.000	-	600.000	-	694.860	-					
001.2.4	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun yang disusun tepat waktu		126.000.000	1	7.502.660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
001.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)		92.000.000	12	7.524.000	4	5.359.000	1	-	1	-						
001.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100%				100%	31.077.500										



001. 3.1	penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD yang disusun		23.205.000	2	1.050.410	-	-	--	--	--	--						
001.3. 2	rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	jumlah dokumen hasil rekonsiliasi barang milik daerah pada SKPD		69.615.000	1	3.990.850			4	11.500.000	1	2.690.000						
001.3. 3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen)		92.000.000	12	10.841.492			4	19.577.500	1	1.050.000						
001.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100%	1.379.615.000		142.454.928			100%	156.809.5001								
001.4. 1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktahirkan (Laporan)		69.615.000		8.020.568			1	10.255.500		501.000						
001.4. 2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen laporan hasil monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai (Dokumen)		230.000.000		37.801.360			1	56.100.0001		13.540.000						
001.4. 3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Lulus Diklat berdasarkan TUSI (Orang)		800.000.000		25.088.000	-	-	-	-	--							



001.4. 4	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (orang)		80.000.000		4.985.000			30	4.100.000							
001.4. 5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (Orang)		200.000.000		66.560.000			5	86.354.000							
001.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (%)	100%	1.494.000.000		374.566.450				273.095.953							
001.5. 1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis)		110.000.000		4.996.850			1	8.976.000	-	1.895.000					
001.5. 2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan		110.000.000		4.997.250			1	4.605.000		1.100.000					
001.5. 3	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)		52.000.000		4.895.800			1	3.669.400							
001.5. 4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)		100.000.000		12.300.000			1	12.299.953							



Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan (dokumen)		86.000.000		7.800.000			1	7.800.000								
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu (laporan)		86.000.000		11.500.000			4	9.900.000	1	300.000						
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)		950.000.000		328.076.550			4	225.845.600	1	62.063.283						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100%	584.847.292		107.740.725			100%	179.478.150								
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)		60.000.000		1.536.800			4	2.357.000	1	250.000						
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)		434.847.292		86.403.925			4	153.961.150	1	13.783.512						
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang)		90.000.000		19.800.000			4	23.160.000	1	-						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan	100%	1.858.375.000		277.710.000			100%	304.370.000								



		yang terpelihara dengan baik (%)															
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (unit)		140.000.000	37.400.000			3	47.000.000	1	11.300.000						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)		1.100.000.000	186.000.000			12	200.000.000	4	61.865.030						
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)		260.000.000	35.310.000			80	38.370.000	3	1.400.000						
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)		223.375.000	10.000.000			1	10.000.000	-	2.685.000						
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)		135.000.000	9.000.000			1	9.000.000		4.893.000						
002	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (persen)	100%	67.589.664.570					6.244.188.086								



002.1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (Menit)	12,50	61.980.795.585	14,00	4.388.034.238				6.012.280.086-								
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen NSPM pencegahan/penanggulangan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	288	28.051.799.575	216	3.810.297.208			1	5.020.384.510		209.000.000						
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	100	1.310.000.000	100	142.533.160			4	126.436.151	1	29.155.000						
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan penyelamatan/e vakuasi saat penanggulangan kebakaran dan non kebakaran	120	448.645.835	100	24.748.360			1	25.091.390	-	680.000						
	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan penanganan kebakaran yang disebabkan B3 dalam daerah Kabupaten/Kota	4	75.000.000	2	2.504.320			1	51.227.520	-1	15.240.000						



Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri secara berkala (setiap tahun), sah dan legal	4	100.000.000	4	3.199.710			1	4.110.592	-	1.110.000						
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang diadakan	599	29.692.210.000	4	216.500.000			68	593.418.750	-	1.210.000						
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dan analisis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	128	1.196.759.000	88	138.684.000			10	158.520.000								
Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah desa/kelurahan yang memiliki sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIKP) yang bisa diperbaharui atau dimutakhirkan secara berkala (setiap tahun), berkelanjutan dan real time	198	924.551.175	100	44.027.980			-	-	-	-						



		yang dimiliki oleh desa/kelurahan setiap tahunnya																
	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar wilayah kabupaten/kota dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	30	181.830.000	6	5.539.500			1	33.091.173	-	10.560.000						
002.2	Inspeksi peralatan proteksi kebakaran	Persentase bangunan gedung yang memenuhi persyaratan proteksi kebakaran	25	400.000.000	10	9.702.190				11.413.634								
	Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah dokumen yang memuat data bangunan/gedung/lingkungan yang dipersyaratkan harus memiliki sistem proteksi kebakaran	820	200.000.000	205	4.853.140			1	5.456.391								
	Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah dokumen yang memuat data bangunan/gedung/lingkungan yang memenuhi kelaikan standar sarana prasarana proteksi kebakaran	820	200.000.000	205	4.849.050			1	5.957.243	-	-						



002.3	Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase jumlah kejadian kebakaran yang diinvestigasi (Persen)	100	122.634.000	100	5.043.380				11.546.313								
	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penilaian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah dokumen yang memuat hasil kejadian kebakaran yang dilakukan investigasi lanjutan meliputi dan pengujian	100	122.634.000	10	5.043.380			1	11.546.313	-	4.980.000						
002.4	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Desa/Kelurahan siap siaga kebakaran (Persen)	51,56	585.419.985	34,37	56.335.790												
	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah warga Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya		190.419.985	22	31.302.610			385	31.841.559	-	7.640.000						
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang terbentuk dan terbina relawan pemadam kebakaran pada lingkup sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) setiap tahunnya	66	395.000.000	11	25.033.180			11	31.986.752	-	-						
002.5	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Korban yang berhasil dievakuasi dalam pelaksanaan operasi	100	4..500.815.000	100	229.241.115				208.948.760								



		pencaharian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia (Persen)																
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan operasi penyelamatan yang mengancam keselamatan manusia	15	276.175.000	7	24.379.800			4	25.361.760	1	8.047.000						
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi sesuai dengan standar teknis	469	3.484.000.000	4	178.134.315			1	30.322.000	-	-						
	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah laporan hasil pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi yang sah dan legal	24	740.640.000	6	26.727.000			79	153.265.000	-	-						
Jumlah capaian kinerja																		
Capaian Kinerja (%)																		

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Berdasarkan RENSTRA Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021-2026 serta hasil analisis terhadap perkembangan kondisi dan kebutuhan organisasi, maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur dijelaskan pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Damkar dan Penyelamatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kebakaran dan penyelamatan non-kebakaran sesuai standar pelayanan minimal	Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	92,77 %	93,97 %	95,18 %	96,38 %	97,59 %	98,79 %
			Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten	40,69 %	45,21 %	49,73 %	54,25 %	58,78 %	63,30 %
2	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Nilai saki	65,00	70,00	72,00	75,00	80,10	80,10
			Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator kinerja Utama

Indikator Kinerja utama (IKU) telah ditetapkan secara formal sehingga akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian satu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Penetapan IKU secara teknis dirumuskan dengan mengacu indicator-indikator sasaran yang terdapat pada Renstra Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur.

Tabel 3.2

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Damkar dan Penyelamatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Formulasi Perhitungan	Target
1.	Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di Kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dibagi jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten/Kota dikali 100 %	96,38 %
		Persentase pelayanan penyelamatan pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran)		Jumlah kegiatan penyelamatan yang terlayani dibagi jumlah laporan/kejadian penyelamatan dalam daerah Kabupaten/Kota dikali 100%	100 %
		Cakupan pelayanan kebakaran Kabupaten	%	Perbandingan jumlah luas wilayah manajemen kebakaran (WMK) dibandingkan dengan luas wilayah Kab. Luwu Timur	54,25 %
2.	Meningkatnya Kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat Daerah	Nilai saki			75,00

3.2 Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025 merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan dalam upaya mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebagai pedoman operasional program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana kerja tersebut menggambarkan tentang program dan kegiatan, anggaran, sarana

dan prasarana, tempat dan waktu kegiatan, serta penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Rencana kerja tersebut mengalami perubahan pada semester kedua yang ditampilkan pada tabel 3.3 dan 3.4 berikut ini :

Table 3.3
Program dan Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan
Rencana Kerja tahun 2025

KODE/URUSAN /PROGRAM/KE GIATAN	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	MURNI		PERUBAHAN		PAGU ANGGARAN		BERTAMBAH/ BERKURANG	%	
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	MURNI	PERUBAHAN			
2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9 - 8)		
05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100%	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100%	Rp 5.329.633.561	Rp 6.606.858.249		
	2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100%	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100%	102.335.000	85.144.770	-	
	0001	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 dokumen	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	Rp 31.185.000	Rp 21.427.500	-Rp	
	0002	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	Jumlah dokumen RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	Rp 5.375.000	Rp 3.000.000	-Rp	

	0004	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	Rp 5.375.000	Rp 3.000.000	-Rp	
	0006	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 laporan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 laporan	Rp 16.500.000	Rp 9.850.000	Rp	
	0007	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	4 laporan	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	4 laporan	Rp 43.900.000	Rp 47.866.610	Rp	
	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100%	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100%	Rp 4.267.192.621	Rp 5.561.607.539		
	0001	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	19 orang/bulan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	44 orang/bulan	Rp 4.203.828.921	Rp 5.510.510.439	Rp	
	0002	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 dokumen	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 dokumen	Rp 56.074.700	Rp 47.498.250		
	0003	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1 dokumen	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1 dokumen	Rp 1.930.000	Rp 1.430.000	Rp -	



	0007	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semes teran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semes teran SKPD	4 laporan	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semes teran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semes teran SKPD	4 laporan	Rp 5.359.000	Rp 2.168.850	Rp	
	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang diadministrasi sesuai standar	100%	Persentase BMD yang diadministrasi sesuai standar	100%	25.146.050	25.146.050		
	0005	- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	4 laporan	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	2 laporan	Rp 7.300.000	Rp 7.300.000	Rp -	
	0006	- Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	4 Laporan	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	2 laporan	Rp 17.846.050	Rp 17.846.050	Rp 0	
	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai PD yang dilayani	100%	Persentase pegawai PD yang dilayani	100%	100.163.900	100.163.900		
	0003	- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1 dokumen	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1 dokumen	Rp 8.653.900	Rp 8.653.900		
	0005	- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	1 dokumen	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	1 dokumen	Rp 48.200.000	Rp 48.200.000		
	0010	- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	35 orang	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	35 orang	Rp 5.221.000	Rp 5.221.000	Rp -	

	0011	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	10 orang	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	9 orang	Rp 43.310.000	Rp 43.310.000		
	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar</i>	<i>100%</i>	<i>Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar</i>	<i>100%</i>	<i>224.278.290</i>	<i>224.278.290</i>		
	0001	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	Rp 8.976.000	Rp 8.976.000		
	0003	- Penyediaan Pelaratan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	Rp 13.290.000	Rp 13.290.000	Rp 0	
	0004	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	Rp 4.089.000	Rp 4.089.000	Rp	
	0005	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1 paket	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1 paket	Rp 12.300.000	Rp 12.300.000	Rp	
	0006	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	Rp 2.700.000	Rp 2.700.000		
	0008	- Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	4 laporan	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	4 laporan	Rp 8.820.000	Rp 8.820.000		
	0009	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 laporan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 laporan	Rp 178.237.800	Rp 178.237.800		

	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100%	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100%				
	0001	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan	Rp 2.357.000	Rp 2.357.000	Rp	-
	0002	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 laporan	Rp 169.220.700	Rp 169.220.700		
	0004	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 laporan	Rp 6.800.000	Rp 6.800.000		
	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100%	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100%				
	0001	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	Rp 82.000.000	Rp 82.000.000		
	0002	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	11 unit	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	12 unit	Rp 289.100.000	Rp 289.100.000		
	0006	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	0 unit	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	80 unit	Rp 42.040.000	Rp 42.040.000		



	0009	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000		
	0011	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	Rp 9.000.000	Rp 9.000.000		
05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN	100%	JUMLAH WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN	100%	RP	RP		
	2.01	<i>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (menit)</i>	<i>13,50 menit</i>	<i>Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (menit)</i>	<i>13,50 menit</i>				
	0001	- Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen NSPM pencegahan/penanggulangan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota setiap tahunnya	1 dokumen	Jumlah dokumen NSPM pencegahan/penanggulangan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota setiap tahunnya	1 dokumen	Rp 3.291.938.606	Rp 3.291.938.606		
	0002	- Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman	4 laporan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman	4 laporan	Rp 197.920.559	Rp 197.920.559		

		Daerah Kabupaten/Kota	kebakarandalam daerah kabupaten/kota		kebakarandalam daerah kabupaten/kota					
	0003	- Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan penyelamatan/evakuasi saat penanggulangan kebakaran dan non kebakaran	1 dokumen	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan penyelamatan/evakuasi saat penanggulangan kebakaran dan non kebakaran	1 dokumen	Rp 6.241.440	Rp 6.241.440		
	0004	- Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan penanganan kebakaran yang disebabkan B3 dalam daerah kabupaten/kota	1 dokumen	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan penanganan kebakaran yang disebabkan B3 dalam daerah kabupaten/kota	1 dokumen	Rp 30.949.140	Rp 30.949.140		
	0005	- Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri secara berkala (setiap tahun), sah dan legal	1 dokumen	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri secara berkala (setiap tahun), sah dan legal	1 dokumen	Rp 2.308.666	Rp 2.308.666		
	0017	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan	Jumlah sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan alat	599 unit	Jumlah sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan alat	31 unit	Rp 2.044.358.750	Rp 2.044.358.750		

		Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait		pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait					
	0007	- Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dan analisis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	11 orang	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dan analisis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	10 orang	Rp 158.520.000	Rp 158.520.000		
	0018	- Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar wilayah kabupaten/kota dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	1 dokumen	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar wilayah kabupaten/kota dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	1 dokumen	Rp 26.891.925	Rp 26.891.925		
	2.02	<i>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</i>	<i>Persentase bangunan gedung yang memenuhi persyaratan proteksi kebakaran</i>	<i>10%</i>	<i>Persentase bangunan gedung yang memenuhi persyaratan proteksi kebakaran</i>	<i>10%</i>	<i>16.094.041</i>	<i>16.094.041</i>		

	0001	- Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah dokumen yang memuat data bangunan/gedung/lingkungan yang dipersyaratkan harus memiliki sistem proteksi kebakaran	1 dokumen	Jumlah dokumen yang memuat data bangunan/gedung/lingkungan yang dipersyaratkan harus memiliki sistem proteksi kebakaran	1 dokumen	Rp 7.981.741	Rp 7.981.741		
	0002	- Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah dokumen yang memuat data bangunan/gedung/lingkungan yang memenuhi kelaikan standar sarana prasarana proteksi kebakaran	205 dokumen	Jumlah dokumen yang memuat data bangunan/gedung/lingkungan yang memenuhi kelaikan standar sarana prasarana proteksi kebakaran	1 dokumen	Rp 8.112.300	Rp 8.112.300		
	2.03	<i>Investigasi Kejadian Kebakaran</i>	<i>Persentase Jumlah kejadian kebakaran yang di investigasi</i>	100%	<i>Persentase Jumlah kejadian kebakaran yang di investigasi</i>	100%	Rp 16.261.353	Rp 16.261.353		
	0001	- Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penilaian dan Pengujian Kejadian Kebakaran	Jumlah dokumen yang memuat hasil kejadian kebakaran yang dilakukan investigasi lanjutan meliputi penelitian dan pengujian	1 dokumen	Jumlah dokumen yang memuat hasil kejadian kebakaran yang dilakukan investigasi lanjutan meliputi penelitian dan pengujian dan penelitian	1 dokumen	Rp 16.261.353	Rp 16.261.353		
	2.04	<i>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</i>	<i>Persentase desa/kelurahan siap siaga kebakaran</i>	34.37%	<i>Persentase desa/kelurahan siap siaga kebakaran</i>	34.37%	Rp 64.769.298	Rp 64.769.298		

0001	- PEMBERDAYAAN Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya	22 orang	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya	358 orang	Rp 25.799.179	Rp 25.799.179		
0002	- Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah desa/kelurahan yang terbentuk dan terbina relawan pemadam kebakaran pada lingkup sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) setiap tahunnya	11 desa/kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang terbentuk dan terbina relawan pemadam kebakaran pada lingkup sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) setiap tahunnya	11 desa/kelurahan	Rp 38.970.119	Rp 38.970.119		
2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	<i>Persentase korban yang berhasil dievakuasi dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia</i>	100%	<i>Persentase korban yang berhasil dievakuasi dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia</i>	100%	Rp 707.092.380	Rp 392.412.380		
0001	- Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan operasi penyelamatan yang mengancam keselamatan manusia	4 laporan	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan operasi penyelamatan yang mengancam keselamatan manusia	4 laporan	Rp 21.138.380	Rp 21.138.380		
0005	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi sesuai dengan standar teknis	3 unit	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi sesuai dengan standar teknis	157 unit	Rp 652.945.000	Rp 338.265.000	Rp	



	0004	- Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1 laporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1 laporan	Rp 33.009.000	Rp 33.009.000		
--	------	---	---	-----------	---	-----------	------------------	------------------	--	--

Table 3.4
Rekapitulasi Kegiatan APBDP Tahun 2025

No.	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	Alasan Bertambah/berkurang
1	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 31.185.000	Rp 21.427.500	-Rp 9.757.500	Penyesuaian jumlah anggaran untuk dimanfaatkan sub kegiatan lain
2	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Rp 5.375.000	Rp 3.000.000	-Rp 2.375.000	Penyesuaian jumlah anggaran untuk dimanfaatkan sub kegiatan lain
3	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 5.375.000	Rp 3.000.000	-Rp 2.375.000	Penyesuaian jumlah anggaran untuk dimanfaatkan sub kegiatan lain
4	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 16.500.000	Rp 9.850.660	-Rp 6.649.340	Penyesuaian jumlah anggaran untuk dimanfaatkan sub kegiatan lain
5	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 43.900.000	Rp 47.866.610	+Rp 3.966.610	Penyesuaian jumlah anggaran untuk dimanfaatkan sub kegiatan lain
6	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 4.203.828.921	Rp 5.510.510.439	+Rp 1.306.681.518	Penyesuaian jumlah anggaran untuk dimanfaatkan sub kegiatan lain
7	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 56.074.700	Rp 47.498.250	-Rp 8.576.450	
8	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 1.930.000	Rp 1.430.000	-Rp 500.000	
10	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Rp 5.359.000	Rp 2.168.850	-Rp 3.190.000	

		Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				
12	1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Rp 7.300.000	Rp 7.300.000	0	
13	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Rp 17.846.050	Rp 17.846.050	0	
14	1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 8.653.900	Rp 8.653.900	0	
15	1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp 48.200.000	Rp 48.200.000	0	
17	1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Rp -	Rp -	-	
18	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Rp 43.310.000	Rp 43.310.0000	0	
19	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 8.976.000	Rp 8.976.000	0	
20	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 13.290.000	Rp 13.290.000	0	
21	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 4.089.400	Rp 4.089.400	0	
22	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 8.165.090	Rp 8.165.090	0	
23	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 2.700.000	Rp 2.700.000	0	
24	1.05.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp 8.820.000	Rp 8.820.000	0	
25	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 178.237.800	Rp 178.237.800	0	
27	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 2.357.000	Rp 2.357.000	0	
28	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 169.220.700	Rp 169.220.700	0	

29	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 6.800.000	Rp 6.800.000	0	
30	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 82.000.000	Rp 82.000.000	0	
31	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 289.100.000	Rp 289.100.000	0	
32	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 42.040.000	Rp 42.040.000	0	
33	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	0	
34	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 9.000.000	Rp 9.000.000	-0	
35	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.291.938.606	Rp 3.291.938.606	0	
36	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 197.920.559	Rp 197.920.559	0	
37	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Rp 6.241.440	Rp 6.241.440	0	
38	1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 30.949.140	Rp 30.949.140	0	
39	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Rp 2.308.666	Rp 2.308.666	0	
40	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan	Rp 2.044.358.750	Rp 1.106.658.750	-937.700.000	Efisiensi anggaran

		Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				
41	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Rp 158.520.200	Rp 158.520.200	0	
43	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp 26.891.925	Rp 26.891.925	0	
44	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Rp 7.981.741	Rp 7.981.741	0	
45	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Rp 8.112.300	Rp 8.112.300	0	
46	1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penilaian dan Pengujian Kejadian Kebakaran	Rp 16.261.353	Rp 11.546.480	0	
47	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Rp 25.799.179	Rp 25.799.179	0	
48	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Rp 38.970.119	Rp 38.970.119	0	
49	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Rp 21.138.380	Rp 21.138.380	0	
50	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Rp 652.945.000	Rp 338.265.000	-Rp 314.680.000	



51	1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan evakuasi	Rp 33.009.000	Rp 33.009.000	0	
		Jumlah				

BAB IV PENUTUP

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2025 telah disusun dalam dokumen Rancangan Renja Perubahan Tahun 2025 ini berdasarkan acuan dokumen-dokumen perencanaan di tingkat vertikal sekaligus mempertimbangkan berbagai hasil analisis terhadap perkembangan terbaru kondisi masyarakat maupun kebutuhan organisasi.

Pada tahun 2025 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu sebanyak 2 program 12 kegiatan dan 46 sub kegiatan

Rencana Kerja perubahan tahun 2025 ini selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran perubahan tahun 2025 pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur. Apabila terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), maka akan dilakukan Perubahan Rencana Kerja dengan berpedoman pada kewenangan urusan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akhir kata semoga Renja Damkar Kabupaten Luwu Timur ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Malili, Agustus 2025

Kepala Dinas Damkar dan
Penyelamatan



dr. BENNY M. Kes

Pangkat Pembina Utama Muda/IV c

NIP. 19680608 200112 1 003